

**ANALISIS KONDISI INDONESIA DALAM KERJA SAMA *INDONESIA-JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IJEPA)* PADA SEKTOR INDUSTRI MANUFAKTUR 2015-2019**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**ANANDA SASKIA PUTRI  
NPM 1646071021**



**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2023**

**ANALISIS KONDISI INDONESIA DALAM KERJA SAMA *INDONESIA-JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IJEPA)* PADA SEKTOR INDUSTRI MANUFAKTUR 2015-2019**

**Oleh**

**ANANDA SASKIA PUTRI**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**Pada**

**Jurusan Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## ABSTRAK

### **ANALISIS KONDISI INDONESIA DALAM KERJA SAMA *INDONESIA-JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT* (IJEPA) PADA SEKTOR INDUSTRI MANUFAKTUR 2015-2019**

Oleh

**ANANDA SASKIA PUTRI**

Industri manufaktur merupakan sektor utama pendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia yang memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pendapatan tahunan negara. Kebutuhan Indonesia untuk meningkatkan sektor industri manufaktur dan ekonomi pun membentuk kerja sama Indonesia-Japan *Economic Partnership Agreement* (IJEPA) di tahun 2007 dan secara resmi diimplementasikan pada tahun 2008. Dalam lima tahun setelah implementasi IJEPA, Indonesia mendesak Jepang untuk melakukan peninjauan ulang terhadap kerja sama IJEPA yang mengindikasikan Indonesia belum merasakan adanya kemajuan pada sektor manufaktur meski dengan pembentukan IJEPA, walaupun dalam pelaksanaannya, IJEPA telah melakukan berbagai upaya untuk Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini ialah mendeskripsikan kerja sama antara Indonesia dan Jepang serta menganalisis kondisi Indonesia sepanjang berlangsungnya IJEPA pada tahun 2015-2019. Penelitian ini menggunakan teori liberal institusionalisme dan konsep kerja sama internasional. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan mengumpulkan data sekunder yang didapat melalui studi pustaka dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa di bawah IJEPA Indonesia masih belum mampu mengembangkan sektor industri manufaktur yang disebabkan oleh ketidakmampuan Indonesia dalam menyadari perbedaan kecepatan dalam mendapatkan manfaat yang akan didapatkan oleh kedua negara di bawah kerja sama IJEPA serta adanya perbedaan dalam segi SDM, teknologi juga ekonomi antara Indonesia dan Jepang.

**Kata Kunci:** Industri Manufaktur, Indonesia-Japan *Economic Partnership Agreement*, kerja sama internasional.

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF THE INDONESIA'S CONDITION WITHIN THE INDONESIA-JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IJEPA) COOPERATION IN THE MANUFACTURING SECTOR 2015-2019**

**By**

**ANANDA SASKIA PUTRI**

The manufacturing industry is the main sector driving the growth of the Indonesian economy which provides a sizeable contribution to the country's annual income. Due to Indonesia's needs to improve the manufacturing and economic sectors, the Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement was established in 2007 and was officially implemented on 2008. Within five years since the implementation of IJEPA, Indonesia urged Japan to conduct a review of the IJEPA cooperation which indicated that Indonesia has not felt any progress in its manufacturing sector even with the establishment of the IJEPA. Despite IJEPA has made various efforts for Indonesia. The purpose of this research is to describe the cooperation between Indonesia and Japan and to analyze Indonesia's condition during the IJEPA cooperation in 2015-2019. This research uses the theory of liberal institutionalism and the concept of international cooperation. A qualitative approach was used in this research to answer the research question by collecting secondary data obtained through literature and documentation. The results of this research indicate that under the IJEPA cooperation, Indonesia is still unable to develop the manufacturing industry sector due to Indonesia's inability to realize the difference to realize the difference in speed in obtaining the benefits that will be obtained by the two countries under the IJEPA cooperation as well as differences in terms of human resources, technology and the economy between Indonesia and Japan.

**Keywords:** Manufacturing Industry, Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement, international cooperation.



Judul Skripsi : **ANALISIS KONDISI INDONESIA DALAM  
KERJA SAMA INDONESIA – JAPAN  
ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT  
(IJEPA) PADA SEKTOR INDUSTRI  
MANUFAKTUR 2015-2019**

Nama Mahasiswa : **Ananda Saskia Putri**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1646071021**


Program Studi : **Hubungan Internasional**


Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**




**MENYETUJUI**

1. **Komisi Pembimbing**

  
**Tety Rachmawati, S.IP., M.A.**  
NIP. 19920309 201903 2 020

  
**Rahayu Lestari, S.I.Kom., M.A.**  
NIP. 19890215 2022 03 2 005

2. Mengetahui  
Ketua Jurusan Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

  
**Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.P.A.**  
NIP. 19810628 200501 1 003



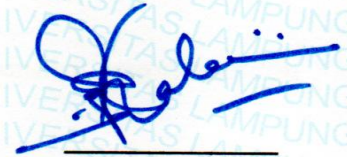
**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

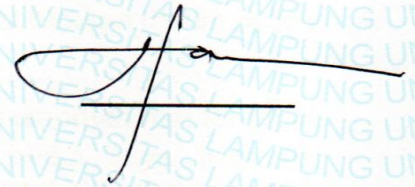
**Ketua : Tety Rachmawati, S.IP., M.A.**



**Sekretaris : Rahayu Lestari, S.I.Kom., M.A.**



**Anggota : Hasbi Sidik, S.IP., M.A.**



**2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Dra. Ida Nurhaida, M.Si.**  
**NIP. 196108071987032001**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 15 Juni 2023**



## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 15 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Ananda Saskia Putri  
NPM. 1646071021

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Lampung Utara pada tanggal 16 Oktober 1998 dari pasangan Bapak Drs. Sena Adhi Witarta, M.H. dan Dra. Indah Hermina Rosmawarni. Penulis merupakan anak kedua dari lima bersaudara dengan satu kakak bernama Muhammad Nata Prabu Negara, S.Kom dan tiga adik bernama Khansa Luthfita Risqi, S.H., Muhammad Narendra Adipati Akbar, dan Ratu Clarissa Anandhita Mu'saqeena. Penulis mulai menempuh pendidikan formal di SDN 04 Tanjung Aman Lampung Utara, SMPN 07 Kotabumi Lampung Utara, dan SMAN 01 Kotabumi Lampung Utara. Pada tahun 2016, penulis diterima sebagai mahasiswa program S-1 di Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur Paralel. Selama masa perkuliahan, penulis aktif mengikuti kegiatan akademik, salah satunya adalah *Indonesia-Croatia Joint Summer School 2019* dan 2020 dan Pertemuan Sela Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional (PNSMHII) XXXI di Universitas Mulawarman pada tahun 2019. Penulis juga mengikuti program PKL di Fungsi Politik Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangkok, Thailand tahun 2020. Selain itu, penulis juga aktif mengikuti kegiatan non-akademik, salah satunya dengan bergabung sebagai panitia pada kegiatan *Model United Nations* (MUN) HI UNILA dan penulis juga pernah tergabung di kepengurusan Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional (PHMJ HI) 2019 sebagai *project evaluator*.



## **Motto**

*“It is courage which can find the solution to every problem.”*

(Amit Kalantri)

*“If you want the rainbow, you gotta put up with the rain.”*

(Dolly Parton)

*“No one can make you feel inferior without your consent.”*

(Eleanor Roosevelt)

## **PERSEMBAHAN**

Untuk Papa, Mama dan keluargaku tersayang

Serta seluruh pembaca

## SANWACANA

Puji dan syukur penulis ucap atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya lah skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi dengan judul *Analisis Kondisi Indonesia dalam Kerja Sama Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) Pada Sektor Industri Manufaktur 2015-2019* ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hubungan Internasional di Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
2. Bapak Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N., M.P.A., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung;
3. Ibu Prof. Dr. Ari Darmastuti, M.A., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung tahun 2018-2022;
4. Bang Hasbi Sidik, S.IP., M.A., selaku Sekretaris Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung sekaligus Dosen Penguji Skripsi, yang telah memberikan semangat, waktu, ilmu dan masukan kepada penulis;
5. Mbak Tety Rachmawati, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi, yang telah senantiasa sabar dalam membimbing penulis dan atas semangat, waktu, ilmu juga masukan kepada penulis;
6. Mbak Rahayu Lestari, S.I.Kom., M.A., selaku Dosen Pembimbing Pendamping Skripsi yang telah senantiasa bersabar dalam membimbing penulis dan atas semangat, waktu, ilmu juga masukan kepada penulis;



7. Mbak Gita Karisma, S.IP., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah memberikan semangat dan kesabaran selama masa perkuliahan kepada penulis;
8. Seluruh dosen dan staf Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung, yang telah banyak memberikan waktu, ilmu, dan bantuan kepada penulis selama masa perkuliahan hingga penulisan skripsi;
9. Kedua orang tua penulis, Bapak Drs. Sena Adhi Witarta, M.H., dan Almh. Ibu Dra. Indah Hermina Rosmawarni, yang telah merawat penulis sejak lahir hingga dewasa dan atas doa, dukungan juga kasih sayang tiada henti;
10. Keluarga besar Alm. Bapak Sukarlan Hadi Suroso dan Alm. Bapak Tohir Kusuma Wihardja atas dukungan dan semangat tiada henti untuk penulis;
11. Teman-teman angkatan 2016 telah selalu menemani penulis dengan canda dan tawa sepanjang masa perkuliahan;
12. Aldo dan Dimas yang telah selalu menyemangati dan mendukung penulis, juga atas waktu, canda dan tawa yang diberikan kepada penulis;
13. Pio, Bintang, Fira, Rodo dan Agung atas bantuan dan diskusi-diskusi yang menyenangkan;
14. Aulia dan Afifah yang telah menemani penulis saat suka dan duka selama ini, juga atas semangat dan waktu yang telah diberikan kepada penulis;
15. Chandra Anwar dan keluarga yang telah membimbing dan memberi masukan kepada penulis pada awal perkuliahan;
16. Debby Putri Ariani atas dukungan, semangat dan hari-hari penuh canda dan tawa.

Bandar Lampung, 15 Juni 2023

Ananda Saskia Putri  
NPM. 1646071021

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GRAFIK.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Kegunaan Penelitian.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
2.2 Landasan Konseptual .....	16
2.2.1 <i>Liberal Institutionalism</i> .....	16
2.2.2 Kerja Sama Internasional.....	19
2.3 Kerangka Pemikiran .....	21
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>20</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	20

3.2 Fokus Penelitian .....	20
3.3 Jenis dan Sumber Data .....	21
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	22
3.5 Teknik Analisis Data .....	22
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>24</b>
4.1 Hasil Penelitian.....	24
4.1.1 Indonesia-Japan <i>Economic Partnership Agreement</i> .....	24
4.1.1.1 User Specific Duty Free Schemes.....	32
4.1.1.2 Manufacturing Industrial Development Center .....	36
4.2 Pembahasan .....	40
4.2.1 Upaya IJEPA Dalam Menjalankan Tujuannya Terhadap Industri Manufaktur Indonesia 2015-2019.....	40
4.2.2 Kondisi Indonesia Dalam Kerja Sama IJEPA Pada Sektor Industri Manufaktur 2015-2019 .....	41
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>53</b>
5.1 Kesimpulan.....	53
5.2 Saran .....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>55</b>



## DAFTAR SINGKATAN

AI	: <i>Artificial Intelligence</i>
BPS	: Badan Pusat Statistik
EPA	: <i>Economic Partnership Agreement</i>
GDP	: <i>Gross Domestic Product</i>
GR-IJEPA	: <i>General Review IJEPA</i>
HS	: <i>Harmonized System</i>
IJEPA	: <i>Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement</i>
JCEP	: <i>Joint Committee on Economic Partnership</i>
JCM	: <i>Joint Committee Meeting</i>
JETRO	: <i>Japan External Trade Organization</i>
JIS	: <i>Japanese Industrial Standards</i>
KADIN	: Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN)
Kemendag RI	: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
Kemenlu RI	: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
Kemenperin RI	: Kementerian Perindustrian Republik Indonesia
METI	: <i>Ministry of Economy, Trade and Industry</i>

MIDEC	: <i>Manufacturing Industrial Development Center</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
REM	: <i>Random Effect Model</i>
USDFS	: <i>User Specific Duty Free Scheme</i>
WIPO	: <i>The World Intellectual Property Organization</i>
WITS	: <i>World Integrated Trade Solutions</i>
WTO	: <i>World Trade Organization</i>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Kategorisasi Sektor Industrial .....	6
Tabel 2.1 Komparasi Penelitian Terdahulu .....	15
Tabel 4.1 Rekomendasi Program New MIDEK.....	39
Tabel 4.2 Perbedaan Ekspor dan Impor Indonesia-Jepang 2015-2019.....	44



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1.1 <i>The 9<sup>th</sup> Joint Committee Meeting of General Review of IJEPA</i> .....	10
2.3 Kerangka Pemikiran Penulis .....	20
4.1 Pertemuan IJEPA Setelah KTT ASEAN ke-33.....	29
4.2 Joint Committee Meeting GR IJEPA ke-11.....	30
4.3 Joint Committee Meeting GR IJEPA ke-12.....	31
4.4 Pertemuan PM Jepang dan Presiden RI di KTT ASEAN 33.....	32
4.5 Pertemuan Penandatanganan Implementasi New MIDECA.....	33

## DAFTAR GRAFIK

Halaman

1.1 Kontribusi Sektor Manufaktur Terhadap GDP Indonesia.....	3
1.2 Nilai Pertumbuhan Sektor Industri di Indonesia.....	4
1.3 Nilai Ekspor Impor Indonesia ke Jepang Sebelum dan Sesudah IJEPA.....	8
4.1 Produk Ekspor dan Impor Indonesia Jepang 2015-2019.....	44
4.2 Nilai Pertumbuhan Manufaktur Indonesia 2015-2019.....	49
4.3 <i>GDP</i> Per Kapita Jepang.....	51
4.4 <i>GDP</i> Per Kapita Indonesia.....	51

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kekuatan suatu negara dapat meningkat tidak hanya karena sektor politik dan keamanan, terdapat sektor lain yang juga dapat menjadi pendorong menguatnya suatu negara, pembangunan sektor industri merupakan salah satunya. Kata industri sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu usaha ataupun serangkaian kegiatan yang mengolah atau memproses bahan mentah (*raw materials*) menjadi barang jadi (*finished goods*) yang mana barang ini pun telah memiliki nilai tambah yang dapat memberi keuntungan. Tertera dalam UU Perindustrian No. 5 Tahun 1984 Pasal 1 Ayat 2, bahwa yang dimaksud dengan industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Tujuan dari pembangunan sektor industri ini berkuat untuk meningkatkan kemakmuran juga kesejahteraan rakyat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara, meningkatkan kemampuan dalam menciptakan teknologi modern, memperluas juga meratakan lapangan pekerjaan, meningkatkan devisa negara melalui kegiatan ekspor hasil produksi nasional yang berkualitas, dan menunjang serta memperkuat stabilitas nasional dalam menjaga ketahanan nasional (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian, t.thn.).

Sektor industri merupakan hal yang penting bagi Indonesia dan telah menjadi fokus Indonesia sejak awal kemerdekaan, yaitu pada Kabinet Presidensial yang mana sektor industri berada di bawah tanggung jawab Kementerian Kemakmuran yang pada saat itu dipimpin oleh Ir. Soerachman Tjokroadisoerjo (Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, t.thn.). Seiring meningkatnya urgensi terhadap perkembangan sektor industri di Indonesia, maka dibentuklah instansi tersendiri yaitu Kementerian Perindustrian pada tahun 1959 pada masa Kabinet Karya yang mana Ir. Freddy Jaques Inkiriwang menjabat sebagai Menteri Perindustrian.<sup>1</sup> Sektor industri yang sejak awal menjadi prioritas bagi Indonesia ialah bidang manufaktur. Manufaktur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai sebuah proses pengubahan bahan atau barang mentah menjadi barang yang dapat dikonsumsi dan digunakan (KBBI, t.thn.). Jika disandingkan dengan definisi dari kata industri, maka industri manufaktur dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan pengolahan yang mentransformasi bahan mentah hingga menjadi suatu produk jadi yang telah memiliki nilai tambah dan dapat memberikan untung.

Dilansir melalui laman resmi Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, industri manufaktur merupakan sektor utama pendorong pertumbuhan ekonomi (Wibowo, 2010). Ada pun beberapa sub-sektor yang termasuk ke dalam industri manufaktur itu sendiri adalah: makanan dan minuman; industri tekstil dan pakaian jadi; industri otomotif; industri elektronik dan elektrik; industri pembuatan logam; industri furnitur dan perlengkapan; industri mesin industrial dan komersil; industri kulit; industri kayu; *miscellaneous manufacturing industry*; industri kertas; penyulingan minyak bumi; industri logam; karet dan plastik; percetakan dan

---

<sup>1</sup> Kementerian Republik Indonesia memiliki sejarah yang panjang. Instansi yang menaungi sektor industri di Indonesia berulang kali mengalami perubahan. Bermula dibentuk di bawah Kementerian Kemakmuran pada tahun 1945, lalu berubah menjadi Kementerian Perdagangan dan Perindustrian di bawah pimpinan Ir. Darmawan Mangoenkoesoemo saat masa Kabinet Sjahrir 1946. Perubahan pun terus berulang hingga berdiri menjadi kementerian terpisah pada tahun 1959 (Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, t.thn.).

penerbitan; dan kimia (NASA, 1996). Industri manufaktur menjadi sektor pendorong pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh berkembangnya sektor industri di Indonesia.

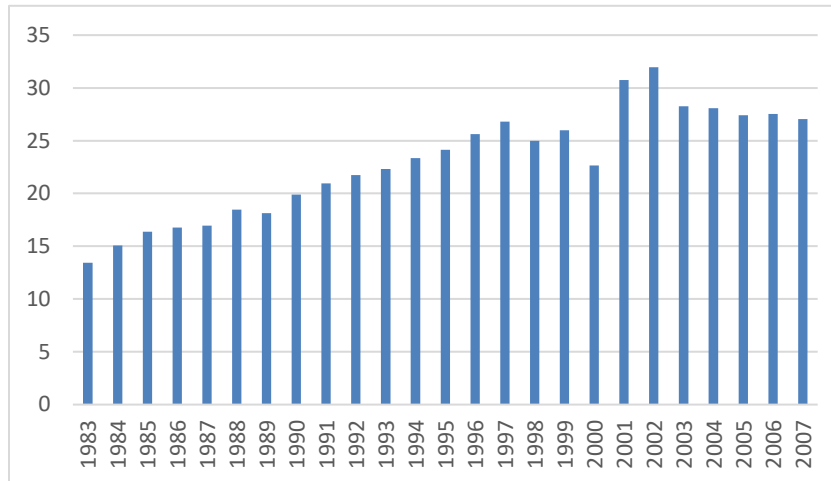
Pengembangan sektor industri atau yang selanjutnya disebut dengan industrialisasi dilandaskan oleh terjadinya revolusi industri pasca globalisasi.<sup>2</sup> Revolusi industri sendiri dapat diartikan sebagai perubahan yang terjadi dengan cepat pada sektor industri yang kemudian memengaruhi kehidupan manusia sehari-hari. Meski berawal di negara-negara barat, karena globalisasi, revolusi industri pun menyebar ke seluruh dunia, begitu pun Indonesia. Revolusi industri di Indonesia lantas mendorong terjadinya perkembangan bidang industri, termasuk industri manufaktur sehingga pertahunnya industri manufaktur menyumbangkan nilai persenan yang tidak sedikit terhadap GDP per kapita Indonesia.<sup>3</sup> Namun, kontribusi yang diberikan sektor manufaktur terhadap GDP Indonesia tidak terus-menerus mengalami peningkatan, tetapi turut ada penurunan juga tren yang stabil seperti yang tertera pada data grafik di bawah ini.

---

<sup>2</sup> Revolusi industri telah terjadi sebanyak 5 kali meski belum merata ke seluruh penjuru dunia. Revolusi Industri 1.0 biasa disebut sebagai *mechanization* bermula pada tahun 1780 dan berfokus terhadap pengenalan alat produksi industri yang didorong oleh air dan tenaga uap. Revolusi Industri 2.0 atau *electrification* bermula pada tahun 1870 dan berfokus kepada produksi massal menggunakan energi elektrik dan jalur rakitan. Revolusi Industri 3.0 atau *automation* berawal pada tahun 1970 dan berfokus pada produksi menggunakan alat otomatis karena peningkatan penggunaan elektronik, telekomunikasi dan komputer. Revolusi Industri 4.0 dikenal sebagai *digitalization*, bermula pada tahun 2011 dan berfokus pada penggunaan sistem siber yang dikoneksikan menggunakan alat *digital* untuk otomatisasi. Terakhir, Revolusi Industri 5.0 atau *personalization*, bermula pada tahun 2020 dan fokusnya ialah sifat saling ketergantungan manusia dan mesin menggunakan sistem komputasi kognitif dan kecerdasan manusia, kustomisasi massal juga personalisasi untuk manusia, atau singkatnya pengembangan sistem *Artificial Intelligence* (AI) (World Economic Forum, 2019).

<sup>3</sup> GDP atau *gross domestic product* adalah perhitungan yang suatu negara gunakan sebagai alat penghitungan utama dari aktivitas perekonomian nasional negara yang mengukur jumlah produksi suatu negara pada area domestik atau dalam negeri (DJKN Kemenkeu Republik Indonesia, 2021).

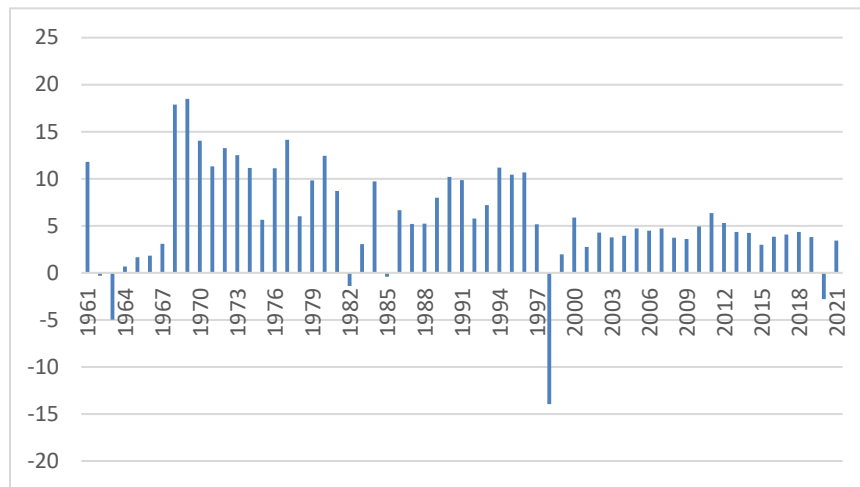


**Grafik 1.1 Kontribusi Sektor Manufaktur Terhadap GDP Indonesia**

Sumber: World Bank

Pada grafik tersebut, kontribusi sektor manufaktur terhadap GDP Indonesia mencapai persenan tertinggi pada tahun 2001-2002. Sebelum melonjaknya persentase kontribusi sektor manufaktur, sementara di tahun-tahun sebelumnya terjadi tren yang tidak stabil namun cenderung meningkat. Sementara setelahnya, pada tahun 2003-2007 tren yang terjadi bersifat stabil meski lebih rendah jika dibandingkan dengan tren kontribusi pada tahun 2001-2002. Walaupun mengalami tren yang berubah-ubah serta memberikan kontribusi dengan persentase yang cukup tinggi pada GDP, nilai pertumbuhan industri di Indonesia mengalami penurunan drastis pasca krisis moneter di Indonesia pada tahun 1998 seperti yang tertera pada grafik 1.2 di bawah ini, yang mana nilai pertumbuhan minus jauh di bawah 0% hingga hampir menyentuh angka -14%. Pada tahun-tahun setelahnya, nilai pertumbuhan industri meningkat pesat hingga tidak lagi berada di bawah 0%, meski begitu, jika dibandingkan dengan tahun-tahun 1998, nilai pertumbuhan industri masih terbilang rendah. Karena sektor industri merupakan sektor pendorong pertumbuhan ekonomi, maka, menyusutnya nilai pertumbuhan industri akan berdampak kepada perekonomian Indonesia jika terus menerus menurun. Karenanya, perbaikan di sektor industri harus diperhatikan agar nilai pertumbuhannya dapat kembali meningkat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki nilai pertumbuhan sektor industri adalah dengan melaksanakan kerjasama internasional dengan negara lain.

**Grafik 1.2 Nilai Pertumbuhan Sektor Industri di Indonesia**



Sumber: World Bank

Kerjasama internasional merupakan salah satu bentuk dari kebijakan luar negeri yang menjadi instrumen krusial bagi negara dalam mengembangkan potensi negara juga dalam mencapai tujuan negara itu sendiri. Sejatinya, negara membutuhkan kerjasama karena tiap negara menghadapi kondisi yang berbeda-beda. Kondisi yang berbeda ini menimbulkan *gap* antar negara-negara yang di mana *gap* ini dapat mengecil dengan adanya kerjasama. Karena kerjasama mengisi kebutuhan negara-negara yang tidak dapat dipenuhi menggunakan sumber daya internal negara itu sendiri. Ada pun beberapa bentuk dari kerjasama internasional, yaitu: kerjasama regional, kerjasama multilateral dan kerjasama bilateral.

Indonesia sebagai negara yang berdaulat menjalin banyak kerjasama internasional dengan negara lain. Satu di antaranya adalah kerjasama bilateral dengan Jepang yang disepakati oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Perdana Menteri (PM) Shinzo Abe pada 20 Agustus 2007. Kerjasama yang kemudian disebut dengan Indonesia-Japan *Economic Partnership Agreement* (IJEPA) ini baru diberlakukan secara efektif satu tahun setelah pengesahannya, yaitu pada 1 Juli 2008 (Ditjen PPI Kemendag Republik Indonesia, 2021). Dengan disetujuinya IJEPA, kerjasama ini menjadi kerjasama ekonomi terintegrasi pertama bagi Indonesia yang diharapkan

dapat memberi perubahan pada perekonomian dan perindustrian Indonesia. IJEPA disepakati dengan tujuan untuk mempererat dan meningkatkan kerja sama antara Indonesia dan Jepang pada sektor ekonomi yang kesepakatannya mencakup: akses pasar yang lebih baik dalam perdagangan jasa, barang maupun investasi; regulasi terkait kekayaan intelektual serta pengadaan pemerintah; fasilitas perdagangan yang di dalamnya terdapat pengimplementasian aturan asal barang serta pengadaan pertemuan reguler terhadap dua negara terkait; dan pembangunan kapasitas yang di dalamnya termasuk pengembangan kapasitas pekerja ekonomi kreatif serta industri 4.0 (KBRI Tokyo, t.thn.). Di bawah kerja sama IJEPA, Indonesia dan Jepang menyusun banyak skema untuk menjalankan misi IJEPA, yang berupa (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2007): Perdagangan barang; Ketentuan asal barang; Prosedur kepabeanan; Investasi; Perdagangan jasa; Pergerakan orang perseorangan; Sumber daya energi dan mineral; Hak milik intelektual; Pengadaan barang dan jasa; Peningkatan lingkungan bisnis dan promosi kepercayaan bisnis; dan Kerja sama. Secara keseluruhan, terdapat 11 skema yang menjadi panduan berjalannya IJEPA yang memiliki cakupan luas ini.

Skema-skema di atas diimplementasikan Indonesia dan Jepang terhadap sektor-sektor perindustrian yang termasuk ke dalam lingkup IJEPA dan sektor utama yang menjadi fokus dari seluruh sektor cakupan IJEPA bagi Indonesia ialah sektor industri. Demi melancarkan implementasi skema IJEPA di Indonesia, Jepang dan Indonesia pun menyepakati pembentukan program *Manufacturing Industrial Development Center* (MIDEC). Sebuah program yang besar dan kompleks di mana seluruh *stake holder* dari kedua negara akan terlibat di dalamnya untuk mengembangkan kondisi industri khususnya manufaktur di Indonesia. Pembentukan program MIDEC di bawah kerangka IJEPA diusulkan Jepang kepada Indonesia dengan tujuan sebagai media pengembangan sektor industri khususnya manufaktur di Indonesia agar daya saing industri Indonesia dapat meningkat dalam pasar domestik ataupun global, terkhususnya Jepang (Kementerian Perindustrian Indonesia, 2013). MIDEC yang merupakan media

pengembangan ini kemudian akan mengaplikasikan kerangkanya terhadap 13 sektor industrial yang dikategorikan menjadi dua sektoral, yaitu:

Cross Sectorals	Specific Sectorals
Pengolahan logam	Otomotif
Cetakan plastic & cetakan aluminium	Listrik & elektronik
Pengelasan	Produk baja & baja
Konservasi energi	Petrokimia & oleokimia
Promosi usaha kecil & menengah (UKM)	Logam non ferro (non besi)
Promosi ekspor & investasi	Tekstil
	Makanan dan minuman

**Tabel 1.1 Kategorisasi Sektor Industrial**  
**Sumber:** Kementerian Perindustrian Indonesia

Dari 13 sektor di atas, terdapat empat sektor yang menjadi sektor pendorong utama berdasarkan minat bersama antara Indonesia dan Jepang (Kementerian Perindustrian Indonesia, 2008): otomotif; elektrikal dan elektronik; peralatan berat dan konstruksi; dan energi. Keempat sektor pendorong tersebut diharapkan mampu menciptakan perubahan di bidang industri dan ekonomi kearah yang positif dengan adanya program MIDEK. Dalam skema MIDEK ini terdapat kegiatan-kegiatan yang akan Jepang laksanakan guna merealisasikan tujuan dari MIDEK itu sendiri. Ada pun kegiatan-kegiatan tersebut berupa: *Basic study* (studi dasar); *Training* (pelatihan); dan *Technical assistance/dispatch experts* (pengiriman ahli).

Dalam menjalankan fungsi dan tujuan MIDEK, kegiatan-kegiatan yang disebutkan pada paragraf sebelumnya kemudian diurai menjadi perkuatan di berbagai *common facilities* (fasilitas umum yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh sektor yang tercakup dalam MIDEK) seperti memperkuat berbagai balai uji dan sistem sertifikasi, pengadaan balai atau fasilitas untuk pelatihan sumber daya manusia, upaya pengembangan atau pengadopsian standar, pengadaan sistem sertifikasi dan penjaminan kualitas produk, peningkatan teknik prouksi, peningkatan manajemen, menyediakan berbagai program

pelatihan bagi SDM pada balai-balai industri terkait dan bagi lembaga atau institusi pendidikan di bawah naungan pemerintah juga asosiasi industri ataupun profesi terkait (Kementerian Perindustrian Indonesia, 2008).

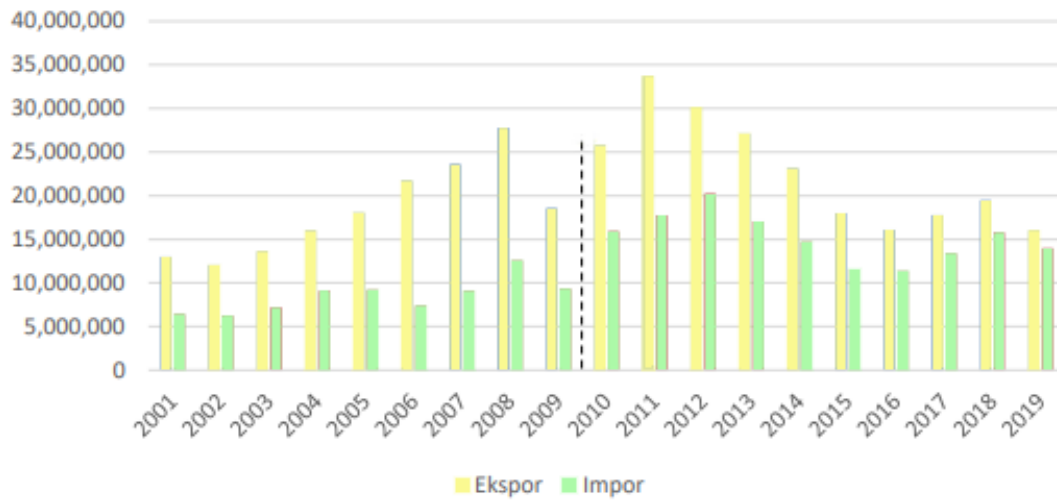
Jepang mengusulkan berbagai kegiatan tersebut kepada Indonesia sebagai alat pelaksana dari tujuan dan manfaat IJEPa yang mana Jepang juga mendapatkan manfaatnya dari program lain yang dibentuk di bawah kerangka kerja sama IJEPa, yaitu *User Specific Duty Free Schemes* (USDFS).<sup>4</sup> USDFS memiliki tujuan untuk menurunkan atau menghilangkan tarif bea masuk produk asal Jepang ke Indonesia yang mana dengan adanya pengurangan bahkan penghilangan tarif bea masuk tersebut ialah representasi dari keuntungan yang Jepang dapatkan di bawah kerja sama IJEPa. Karena USDFS yang secara spesifik ditujukan untuk Jepang, MIDECA lantas dibentuk sebagai representasi timbal balik yang akan Indonesia dapatkan dari kerja sama IJEPa. Dengan terbentuknya MIDECA yang berfokus kepada peningkatan sektor industri Indonesia, maka terdapat kegiatan studi dasar, *training*, dan bantuan berupa pendampingan teknis di bawah skema MIDECA yang dilakukan Jepang untuk Indonesia. Namun, dikutip melalui pernyataan Direktorat Jenderal Kerja Sama Industri Internasional (Dirjen KII) Kementerian Perindustrian Indonesia di tahun 2013, Agus Tjahajana, hasil kerja sama Indonesia dengan Jepang melalui IJEPa masih belum memuaskan (Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2013). Pada tahun yang sama, melalui Menteri Perindustrian Mohamad Suleman Hidayat, Indonesia mengajukan peninjauan kembali terhadap IJEPa kepada Jepang (Kementerian Perindustrian Indonesia, 2013). Dikatakan oleh Menteri Hidayat, bahwa dalam seluruh sektor kerja sama IJEPa, nilai pertumbuhan impor barang produksi Jepang ke Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan nilai pertumbuhan ekspor barang produksi Indonesia ke Jepang.

---

<sup>4</sup> USDFS adalah skema pembebasan bea masuk atau penetapan tarif bea masuk yang diberikan khusus terhadap sejumlah produk impor dari Jepang (*user*). *User* ialah badan usaha milik Jepang yang telah berbadan hukum di Indonesia dan layak untuk mendapatkan fasilitas USDFS melalui Surat Keterangan Verifikasi Industri-USDFS (SKVI-USDFS) yang diterbitkan oleh perusahaan (*surveyor*) yang ditunjuk oleh Menteri Perindustrian untuk memverifikasi pemohon dari program USDFS itu sendiri (Kementerian Keuangan, 2008).



**Grafik 1.3 Nilai Ekspor Impor Indonesia ke Jepang Sebelum dan Sesudah IJEPA (US \$)**



Sumber: International Trade Center (ITC)

Seperti yang dapat dilihat pada grafik 1.3 ekspor dan impor Indonesia sejak 2001-2019 di bawah ini. Jika dilihat secara sekilas, grafik di bawah menunjukkan jika nilai ekspor Indonesia memang selalu lebih tinggi dibandingkan nilai impor. Puncak di mana nilai ekspor Indonesia ke Jepang mencapai angka tertinggi adalah pada tahun 2011 ya itu pada masa setelah adanya kerja sama IJEPA, hampir mencapai 35 juta USD yang mana angka ini dua kali lipat nilai impor Indonesia di tahun yang sama yang berada di sekitar angka 23 juta USD. Pada grafik di atas, terlihat jika nilai ekspor dan impor mengalami perubahan yang signifikan antara masa sebelum implementasi IJEPA dengan masa awal implementasi IJEPA. Pada grafik 1.3, dapat dilihat bahwasannya nilai ekspor dan impor bersifat fluktuatif yang mana setelah mengalami peningkatan pesat di tahun 2011, nilai ekspor menurun dan meski nilai ekspor tetap lebih tinggi dibanding impor, nilai impor tidak berkurang dan justru mengalami peningkatan di tahun 2012. Di tahun 2013 baru lah nilai impor turut menyusut bersama nilai ekspor yang mana sejak tahun ini baik nilai ekspor maupun impor terus mengalami penurunan hingga tahun 2019. Nilai ekspor sejak tahun 2013-2017, memang tidak mengalami penurunan yang drastic dalam satu waktu namun bertahap dari tahun ke tahun dan sedikit meningkat pada tahun 2018 lalu kembali menurun pada 2019. Penurunan pada tahun-tahun yang telah disebutkan, jika dibandingkan dengan tahun pada masa sebelum

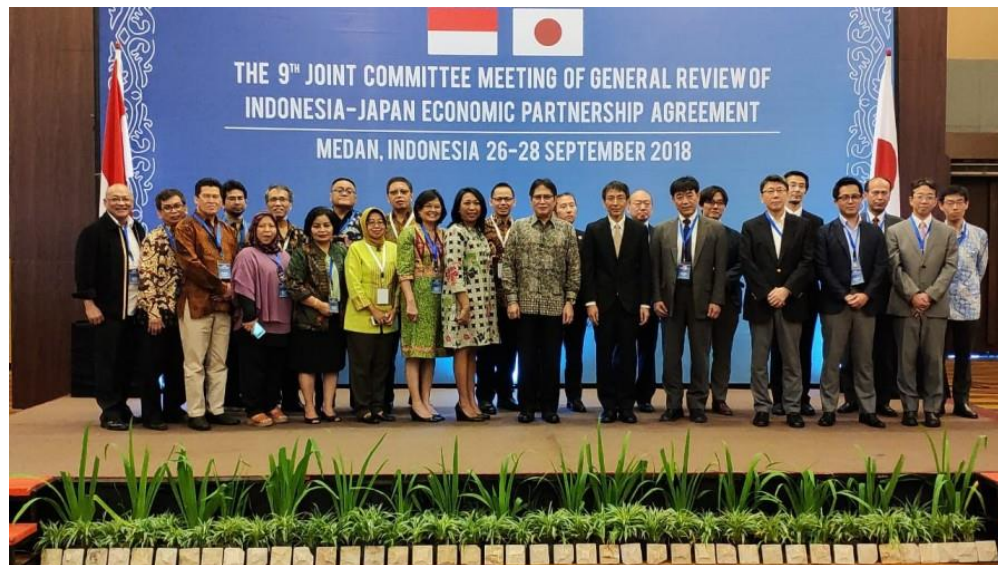
ada kerja sama IJEPA terlihat memiliki angka yang tidak jauh berbeda. Sementara, nilai impor meski turut mengalami penurunan di tahun 2013-2016, memiliki nilai yang jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai impor pada masa sebelum implementasi IJEPA. Hal ini lah yang menjadi landasan dari perkataan Menperin Sulaeman Hidayat bahwa nilai pertumbuhan impor jauh lebih tinggi dibanding ekspor.

Lebih lanjut, Kementerian Perindustrian Indonesia juga menyatakan bahwa target dari empat sektor pendorong belum tercapai dengan maksimal dan sebagai contoh, Indonesia menargetkan untuk melakukan produksi 1 juta unit mobil, 8 juta unit sepeda motor dan 10.000 alat berat. Walaupun target produksi dalam sektor otomotif berhasil dicapai, namun dalam produksi alat berat, target yang telah ditentukan tidak tercapai, bahkan ada indikasi penurunan produksi (Kementerian Perindustrian Indonesia, 2013). Karenanya, Menteri Perindustrian Mohamad Suleman Hidayat mengajukan untuk adanya peninjauan ulang terhadap IJEPA. Pada tahun yang sama, program MIDEK dihentikan karena Indonesia merasa manfaat yang diberikan MIDEK belum sesuai dengan harapan Indonesia atas manfaat program tersebut pada sektor manufaktur Indonesia (Dirjen Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional Kemenperin RI, 2019).

Meski Indonesia telah mengajukan peninjauan ulang atau *general review* terkait kerja sama IJEPA kepada Jepang sejak tahun 2013, *general review* tersebut tidak menunjukkan hasil secara instan yang dikarenakan perundingan di antara Indonesia dan Jepang sempat terhenti pada tahun 2016 sebab Jepang menolak untuk melanjutkan perundingan. Penolakan Jepang untuk meneruskan *general review* IJEPA disebabkan oleh isu tarif produk otomotif dan baja. Tepatnya, produsen komponen elektronika dan otomotif yang berasal dari Jepang mengancam untuk menghentikan produksi mereka di Indonesia akibat adanya penerapan aturan baru terkait ekspor logam sisa produksi (Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2016). Bagi Jepang, peraturan yang diterapkan oleh Indonesia ini tidak kondusif dan mengganggu aktivitas produksi juga menurunkan kepercayaan antara mitra bisnis Indonesia dan Jepang di pasar internasional. Meski begitu, perundingan terkait IJEPA akhirnya dilanjutkan kembali

pada tahun 2017 setelah ditunda selama kurang lebih 1.5 tahun (FTA Center Kemendag Republik Indonesia). Di tahun berikutnya, yaitu 2018, Indonesia dan Jepang kembali mengadakan pertemuan atau *joint committee* terkait *general review* dari IJEPA. Namun, pada pertemuan ini, Indonesia dan Jepang masih belum menemukan kesepakatan dan kesepakatan bersama. Hal ini berlangsung cukup lama yang mana hingga tahun 2023, peninjauan ulang IJEPA masih belum selesai. Karenanya, penulis merasa perlu untuk membahas kondisi Indonesia dalam kerja sama IJEPA pada sektor industri manufaktur.

**Gambar 1.1** *The 9<sup>th</sup> Joint Committee Meeting of General Review of IJEPA*



Medan, 26-28 September 2018

## 1.2 Rumusan Masalah

Hadirnya kerja sama IJEPA sebagai wadah kerja sama terintegrasi pada sektor ekonomi dan industri diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan sektor industri manufaktur dan perekonomian Indonesia melalui program MIDEK. Namun, IJEPA dan MIDEK dihadapi dengan hambatan dari kondisi internal industri manufaktur Indonesia

serta tidak seimbangnya manfaat yang Indonesia dapatkan dari hadirnya MIDEK, yang mana hal tersebut menghambat tujuan IJEPA yan MIDEK dalam melaksanakan fungsinya hingga kerja sama yang dilaksanakan cenderung tidak efektif. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, pertanyaan penelitian yang diangkat oleh penulis adalah: **“Bagaimana kondisi Indonesia dalam kerja sama IJEPA pada sektor industri manufaktur tahun 2015-2019?”**

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Mendeskripsikan kerja sama antara Indonesia dan Jepang dalam IJEPA pada tahun 2015-2019; dan
- b. Menganalisis kondisi Indonesia pada kerja sama IJEPA dalam sektor industri manufaktur tahun 2015-2019;

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini memiliki kegunaan teoritis: penelitian ini diharapkan menghasilkan pengetahuan baru yang dapat menjadi tambahan literatur tentang ilmu sosial dan ilmu dalam studi hubungan internasional yang berkaitan kondisi Indonesia pada kerja sama IJEPA di bidang industri manufaktur.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan lima penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian penulis, yaitu, “Analisis Kerja Sama Indonesia Dan Jepang Melalui *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)* Pada Sektor Industri di Indonesia 2015-2019.” Penelitian pertama yang penulis jadikan acuan disusun Jessica Sitepu dan Akhmad Syakir Kurnia pada tahun 2019, berjudul “Dampak Penerapan *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)* Terhadap Nilai Ekspor Impor Indonesia” (Sitepu & Kurnia, 2019). Dalam penelitian tersebut, Sitepu dan Kurnia menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis regresi. Berlandaskan kepada konsep perdagangan internasional, penelitian ini berfokus kepada dampak dari penerapan IJEPA dalam sektor impor dan ekspor pada komoditas yang diperdagangkan menurut klasifikasi *harmonized system (HS)*. HS merupakan metode numerik terstandarisasi untuk mengklasifikasikan produk dagang (US International Trade Administration, t.thn.). Metode ini digunakan oleh otoritas pabean di seluruh dunia untuk melakukan indentifikasi produk saat menilai bea dan pajak juga dalam mengumpulkan statistik.

Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwasannya nilai ekspor dan impor Indonesia dan Jepang dari tahun 2001 hingga 2018 mengalami fluktuasi yang cenderung sama. Dalam sisi ekspor, nilai yang ditunjukkan tidak melambung signifikan baik dari sebelum IJEPA (2001-2008) hingga diberlakukannya IJEPA (2009-2018). Berkebalikan dengan nilai impor yang mengalami peningkatan pasca

berlakunya IJEPA meskipun di tiap tahunnya terjadi fluktuasi yang inkonsisten. Berdasarkan hasil estimasi dengan *Random Effect Model* (REM), pendapatan nasional Indonesia dan Jepang secara positif mempengaruhi nilai ekspor dan impor Indonesia yang mana jika terjadi peningkatan pada GDP Jepang maka ekspor Indonesia akan meningkat, sementara jika terjadi peningkatan GDP Indonesia, maka nilai impor Indonesia lah yang akan meningkat. Selain itu, fungsi kurs riil Indonesia dan Jepang bersikap berbeda antara satu sama lain. Di mana pada sisi ekspor, peran kurs akan berdampak negatif terhadap nilai ekspor sementara nilai impor akan memiliki dampak positif.

Lebih lanjut dalam jurnal yang ditulis oleh Sitepu dan Kurnia ini, membuktikan bahwasannya peningkatan jumlah penduduk negara bukan berarti jumlah konsumsi negara tersebut akan turut meningkat. Hal ini berlaku bagi Jepang yang semula diharapkan akan meningkatkan *market size* produk Indonesia di Jepang nyatanya justru menunjukkan pengaruh yang negatif yang mana hal ini berkebalikan dengan Indonesia yang jumlah konsumsi negaranya turut meningkat bersama peningkatan jumlah penduduknya sehingga berhasil meningkatkan *market size* produk-produk Jepang di Indonesia. Dengan adanya fenomena tersebut, Sitepu dan Kurnia menyimpulkan bahwa IJEPA tidak terlalu memberikan pengaruh yang signifikan baik di bidang ekspor maupun impor Indonesia terhadap Jepang.

Penelitian kedua adalah penelitian yang berjudul “Dampak Hubungan Bilateral Indonesia dengan Jepang Sebelum dan Sesudah *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA)” yang ditulis oleh Rachmaniar Dwi Zulfira pada tahun 2019. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berkala (*time series*), penelitian ini menggunakan konsep perdagangan internasional, *absolute advantage* dan *comparative advantage*. Zulfira dalam penelitiannya ini berfokus terhadap ada atau tidaknya dampak yang memberikan perbedaan terhadap nilai ekspor dan impor Indonesia kepada Jepang, investasi Indonesia asal Jepang dan nilai kurs dengan implementasi IJEPA. Hasil dari penelitian Zulfira ini memuat bahwa antara IJEPA dan produk ekspor Indonesia ke Jepang terdapat hubungan yang signifikan.

Meski begitu, baik sebelum maupun sesudah IJEPA, nilai ekspor Indonesia ke Jepang tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan yang disebabkan oleh masyarakat Jepang yang secara dominan lebih memilih menggunakan produk lokal milik Jepang sendiri dibandingkan produk impor dari Indonesia. Sementara itu, untuk Indonesia, investasi asing Indonesia asal Jepang mengalami peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan sebelum adanya IJEPA, hal ini disebabkan pengoptimalan pemanfaatan tarif USDFS dalam kerangka IJEPA (Zulfira, 2019). USDFS adalah skema pembebasan bea masuk dari pemerintah Indonesia untuk produk yang diimpor dari Jepang (Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2015), yang mana pihak yang berhak mendapatkan manfaat dari adanya USDFS adalah perusahaan Jepang yang telah memiliki legalitas di Indonesia yang diterbitkan oleh surveyor. Dengan adanya USDFS maka investor asal Jepang akan tertarik untuk menanam modal ke Indonesia. Meski begitu, tidak terdapat korelasi yang signifikan antara IJEPA dengan investasi yang diterima Indonesia asal Jepang. Selain yang telah disebutkan sebelumnya, Zulfira juga menyatakan bahwa meski terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah IJEPA terhadap nilai kurs rupiah kepada dolar, namun tidak ada korelasi yang signifikan antara IJEPA dengan nilai kurs rupiah terhadap dolar.

Penelitian ketiga ditulis oleh Tirta Nugraha Mursitama, Noerlina dan Anastasia Sabrina pada tahun 2019 dengan judul "*Implementation Of Indonesia Japan Economic Partnership Agreement: A Comparison Of User Specific Duty Free Scheme And Manufacturic Industrial Development Center Programs*". Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan konsep *issue linkage*. Fokus penelitian ini adalah implementasi program USDFS dan MIDEK dalam kerangka IJEPA pada tahun 2008-2012. Hasil dari penelitian ini adalah *issue linkage* yang menggabungkan USDFS dan MIDEK yang meskipun sama-sama berada dalam lingkup kerja sama ekonomi, namun memiliki fokus yang berbeda, mendatangkan keuntungan bagi Indonesia dan Jepang yang menjalin kerja sama melalui IJEPA. Dengan program USDFS dan MIDEK, Indonesia mendapatkan bantuan untuk meningkatkan daya saing dan nilai kualitas produksi pada sektor industri yang akan direalisasikan melalui bantuan teknis seperti

*workshop*, seminar, pelatihan, kunjungan kerja dan pengiriman tenaga ahli. Sementara Jepang juga diuntungkan dengan murahnya harga bahan baku otomotif untuk meningkatkan basis industrinya di Indonesia. Melalui penelitian ini Mursitama, dkk. Menyatakan bahwasannya kepentingan yang dimiliki Indonesia dan Jepang tidak bersifat inheren tetapi secara praktis saling berhubungan. Sejalan dengan tujuan dari kedua program di bawah kerangka IJEPa ini, yang mengarah kepada sektor ekonomi namun memiliki kepentingan yang berbeda, yaitu transfer teknologi untuk Indonesia dan pengurangan biaya untuk Jepang (Mursitama, Noerlina, & Sabrina, 2019).

Mursitama, dkk., menyatakan bahwa dalam kerjasama ini, Jepang berperan sebagai *linker*, pihak yang mengusulkan percepatan laju empat sektor penggerak yaitu bahan baku listrik dan elektronik, energi, alat berat dan sektor otomotif dalam USDFS ke Indonesia (*linkee*) untuk mencapai kepentingannya yang adalah mendapatkan bahan baku yang murah untuk meningkatkan basis industrinya di Indonesia, khususnya otomotif. Sebagai balasannya, Indonesia mendapatkan kompensasi melalui MIDEK yang mana Jepang akan memberikan bantuan untuk meningkatkan daya saing industri terkait nilai kualitas produksi. Bagi Mursitama, dkk., kedua negara saling diuntungkan dengan adanya program kerja sama mereka, yang mana Jepang diuntungkan dari bahan baku otomotif yang murah dan Indonesia mendapatkan bantuan teknis berupa *workshop*, seminar, pelatihan, kunjungan kerja, *training for trainer*, dan pengiriman tenaga ahli.

Penelitian keempat ditulis pada tahun 2020 oleh Yusron Avivi dan Muhnizar Siagian dengan judul “Kepentingan Indonesia Dalam Kerjasama Bilateral Dengan Jepang Studi Kasus: *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPa)*” menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analitis. Berlandaskan kepada konsep kepentingan nasional, penelitian ini juga berfokus kepada hal yang sama, yaitu kepentingan nasional Indonesia dalam menjalin kerjasama dengan Jepang melalui IJEPa. Dijelaskan oleh Avivi dan Siagian, tujuan dilaksanakannya IJEPa adalah agar Indonesia serta Jepang mendapatkan keuntungan yang seimbang melalui liberalisasi pasar, fasilitasi dan pengembangan kapasitas. IJEPa juga bertujuan untuk memperkuat



kerjasama yang sebelumnya telah terjalin antara Indonesia dan Jepang terlebih di sektor ekonomi dan arena kondisi ekonomi kedua negara *partner* ini saling melengkapi. Adapun kerangka tujuan IJEPA secara terperinci dijelaskan oleh Avivi dan Siagian untuk liberalisasi perdagangan barang dan jasa antara kedua negara, perlindungan hak kekayaan intelektual, peningkatan transparansi dan menciptakan pemerintahan yang saling menguntungkan, promosi kegiatan anti-persaingan, dan terakhir menetapkan prosedur yang efektif dalam menjalankan perjanjian dan menyelesaikan perselisihan (Avivi & Siagian, 2020).

Menurut Avivi dan Siagian, kepentingan nasional Indonesia dan Jepang lah yang menjadi landasan dari terjalinnya kerja sama ini. Ada pun kepentingan nasional yang ingin dicapai Indonesia melalui IJEPA ini ialah pertumbuhan ekonomi melalui sektor industri, peningkatan akses dan ekspansi produk Indonesia terhadap pasar Jepang agar dapat menaikkan nilai ekspor dan daya saing industri yang kuat, juga mengembangkan industri agar dapat mendorong berkembangnya kapasitas industri Indonesia.

Penelitian kelima disusun oleh Edwin Septian Kambey pada tahun 2016 dengan judul “Kegagalan Indonesia Dalam Implementasi Indonesian Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)” menggunakan pendekatan kuantitatif dan konsep *competitive advantage*. Penelitian ini berfokus pada permasalahan dalam pengimplementasian kerangka IJEPA yang mana kerja sama IJEPA dengan program MIDEK tidak efektif bagi Indonesia. Hadirnya MIDEK di bawah kerangka IJEPA termasuk ke dalam pilar kerja sama melalui pengembangan kapasitas untuk sektor-sektor industri yang menjadi prioritas (otomotif, elektronik, alat berat dan energi) Indonesia dan karenanya, Jepang bertanggung jawab untuk meningkatkan kapasitas sektor perindustrian Indonesia menggunakan MIDEK sebagai wadah bagi Jepang membantu memaksimal dan meningkatkan sektor perindustrian tersebut (Kambey, Kegagalan Indonesia Dalam Implementasi Indonesian Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA), 2016). MIDEK merencanakan beberapa agenda dalam menjalankan tugas dan tujuannya yaitu *basic study*, *technical assistance/dispatch expert*, *training* dan *workshop*. Sepanjang pelaksanaan MIDEK pasca dibentuk, dari

beberapa sektor prioritas, hanya sektor otomotif yang mencapai target produksi yang sebelumnya telah ditetapkan. Kambey menyatakan bahwa alasan dari tidak efektifnya MIDEK bagi Indonesia ialah lemahnya konsep dari MIDEK itu sendiri. MIDEK yang berfungsi sebagai pendorong pengembangan kapasitas industri Indonesia agar daya saing Indonesia turut meningkat, selama pelaksanaannya justru belum mampu mendorong Indonesia dalam meningkatkan daya saing industri dalam skala nasional. Agenda-agenda yang disusun di bawah kerangka MIDEK dianggap hanya berpusat pada *basic study* dan pelatihan SDM yang tidak memiliki dampak langsung terhadap produktivitas industri nasional Indonesia.

Kelima penelitian terdahulu yang telah penulis uraikan di atas memberikan hasil eksplorasi terkait kerja sama Indonesia dan Jepang melalui *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement*. Adapun kesamaan lima penelitian tersebut dengan penelitian milik penulis ialah pembahasan terkait IJEPA dan berdasarkan observasi peneliti secara daring, penulis tidak menemukan penelitian yang membahas tentang kondisi Indonesia dalam kerja sama IJEPA pada sektor industri manufaktur pada rentang waktu 2015-2019. Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti kondisi Indonesia dalam kerja sama IJEPA.

Nama Penulis	Pendekatan Penelitian	Konsep dan Teori	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
Jessica Sitepu dan Akhmad Syakir Kurnia	Pendekatan kuantitatif.	Perdagangan internasional.	Dampak IJEPA terhadap nilai perdagangan Indonesia - Jepang dengan klasifikasi <i>harmonized system</i> .	Pendapatan nasional Indonesia dan Jepang melaju ke arah positif pada nilai ekspor dan impor Indonesia, namun tidak ada dampak yang signifikan pada kedua bidang pasca IJEPA.
Rachmaniar Dwi Zulfira	Pendekatan kuantitatif.	Perdagangan internasional, <i>absolute advantage</i> dan <i>comparative advantage</i> .	Dampak yang membedakan nilai ekspor dan impor Indonesia ke Jepang, investasi asing dan nilai kurs.	Antara IJEPA dan ekspor Indonesia ke Jepang, terdapat korelasi yang signifikan, namun, tidak ada perbedaan signifikan antara ekspor Indonesia ke Jepang pra dan pasca IJEPA.
Tirta Nugraha Mursitama, Noerlina dan Anastasia Sabrina	Pendekatan kualitatif deskriptif.	<i>Issue linkage</i> .	Implementasi program USDFS dan MIDEK dalam kerangka IJEPA pada tahun 2008-2012 yang ditinjau menggunakan konsep <i>issue linkage</i> .	<i>Issue linkage</i> memiliki manfaat tersendiri bagi Indonesia dan Jepang. Indonesia mendapatkan bantuan untuk meningkatkan daya saing dan nilai kualitas produksi pada sektor industri, Jepang juga keuntungan dari murahnya harga bahan baku otomotif serta penurunan biaya bea masuk untuk meningkatkan basis industrinya di Indonesia.
Yusron Avivi dan Muhnizar Siagian.	Pendekatan kualitatif deskriptif analitis.	Kepentingan nasional.	Kepentingan nasional Indonesia dalam kerja sama IJEPA.	Pengoptimalisasi kerja sama, kepastian terhadap peningkatan akses pasar di Jepang karena penurunan tarif, peningkatan arus barang dan jasa, mendapatkan transfer teknologi dari Jepang dan Indonesia menjadi pusat pengembangan manufaktur.
Edwin Septian Kambey	Pendekatan kuantitatif.	<i>Competitive advantage</i> .	Ketidak efektifan kerangka IJEPA.	Dari 4 sektor pendorong utama Indonesia yang menjadi fokus IJEPA (otomotif; elektrik dan elektronik; alat berat; dan energi), hanya sektor otomotif yang berhasil mencapai target. Pengembangan sektor industri melalui IJEPA dan MIDEK masih terkesan luas dan tidak fokus terhadap sektor unggulan Indonesia.

**Tabel 2.1 Komparasi Penelitian Terdahulu**  
**Sumber:** Hasil Olahan Peneliti

## 2.2 Landasan Konseptual

Sebagai panduan bagi penulis dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan teori dan konsep yang relevan dengan topik penelitian ini, yaitu: *liberal institutionalism* dan kerja sama internasional.

### 2.2.1 *Liberal Institutionalism*

Liberal institusionalisme merupakan sebuah teori turunan dari teori liberalisme, teori pertama dalam ilmu hubungan internasional yang menjadi fondasi terbentuknya ilmu hubungan internasional itu sendiri. Teori liberalisme pertama kali dicetuskan oleh seorang filsuf bernama John Locke, yang mana John Locke menyatakan bahwa negara hadir untuk menjamin kebebasan warga negaranya dan dengan adanya jaminan tersebut, memungkinkan bagi warga negara untuk menjalani kehidupan mereka dan mengejar kebahagiaan mereka tanpa adanya campur tangan yang tidak semestinya dari pihak mana pun (Jackson & Sorensen, 2016). Secara mendasar, liberalisme adalah sebuah teori yang menekankan bahwa kebebasan serta hak individu adalah hal yang penting bagi setiap manusia. Locke, terdapat tiga hal penting yang mendasari teori liberalisme, yaitu: kehidupan, kebebasan dan kepemilikan. Pertama, dalam poin kehidupan, dikatakan bahwa negara harus mampu melindungi kehidupan dari setiap warga negaranya. Kedua, kebebasan yang disebutkan merujuk kepada hal yang sebelumnya telah disebutkan, bahwasannya tiap individu memiliki haknya masing-masing yang mana hak tersebut tidak boleh direnggut oleh pihak mana pun dan negara wajib melindungi hak-hak tiap individu. Ketiga, kepemilikan artinya negara wajib melindungi harta benda yang dimiliki seorang individu dan individu tersebut berhak untuk memanfaatkan harta benda yang ia miliki sebagai mana yang diinginkan untuk mendapatkan kebahagiaan.

Pada teori liberalisme, terdapat empat aliran pemikiran liberalisme, yaitu (Jackson & Sorensen, 2016):

1. *Sociological liberalism* (liberalisme sosiologi)

Aliran sosiologi menjelaskan bahwa dalam ilmu hubungan internasional, yang dipelajari tidak hanya hubungan antar pemerintah namun juga mempelajari hubungan antar kelompok dan individu.

2. *Interdependence liberalism* (liberalisme interdependensi)

Aliran interdependensi menjabarkan terkait meningkatnya interdependensi atau sifat saling berkegantungan antar negara juga aktor transnasional yang mana hal ini diiringi dengan terjadinya modernisasi.

3. *Republican liberalism* (liberalisme republikan)

Aliran republikan menjabarkan bahwasannya negara-negara yang menganut sistem demokrasi tidak dapat berperang terhadap satu dengan lainnya yang mana hal ini dikarenakan liberalisme adalah perspektif yang mengedepankan kerja sama serta perdamaian.

4. *Institutional liberalism* (liberalisme institusional)

Aliran institusional menjelaskan jika adanya institusi internasional di tengah-tengah negara-negara yang melaksanakan kerja sama akan memajukan kerja sama itu sendiri. Adanya institusi yang menjembatani kerja sama antar negara akan mengurangi konflik antar negara-negara.

Lebih lanjut terkait liberalisme institusional, dalam perspektif liberal, hubungan internasional memproyeksikan bahwasanya lembaga-lembaga internasional hadir sebagai promotor kerja sama internasional. Para pakar liberalisme percaya bahwasanya sebuah lembaga atau institusi mampu memberikan sebuah landasan maupun cara yang kolektif dalam mendorong sebuah hubungan yang baik antar negara, secara khusus pada mediasi dan diplomasi. Adanya kepentingan bersama dalam melakukan setiap proses mediasi serta menciptakan kepentingan nasional akan menciptakan kondisi perbedaan pendapat yang dapat diminimalisir. Oleh sebab itu, akan dicapai sebuah kerja sama berkelanjutan serta memaksimalkan keuntungan relatif dari negara-negara

yang saling bekerja sama. Lembaga ataupun institusi internasional menjadi sebuah wadah perantara yang baik. Suatu lembaga juga akan mendorong sebuah kepercayaan antar negara-negara yang tergabung didalamnya, serta potensi adanya kecurangan dalam perpolitikan antar negara bisa diminimalisir. Menurut Keohane, institusionalisme liberal percaya bahwa sebuah lembaga akan mendorong kerja sama yang akan menciptakan sebuah informasi yang baik terhadap semua aktor negara (Keohane & Nye, 2012). Dalam bukunya yang sama, Robert Keohane serta Joseph Nye juga mengemukakan jika pencetusan teori ini ialah sebagai bentuk promosi untuk mendorong terjadinya kerja sama antar negara sehingga negara-negara dapat meningkatkan stabilitas keamanan serta mampu membentuk dan mengelola sebuah institusi internasional yang akan mewadahi kerja sama dari negara-negara.

*Liberal Institutionalism* merupakan sebuah teori yang menekankan peran dari lembaga internasional dalam mempromosikan kerja sama yang dilakukan oleh negara dengan negara lainnya serta mengurangi konflik antar negara. Menurut Robert Jackson dalam penelitiannya berpendapat bahwasanya liberalisme institusional tidak akan memiliki potensi persaingan keamanan yang masif yang mengacu pada peperangan dan kekerasan. *Liberal institutionalism* akan memberikan perhatian pada pemerintahan serta organisasi global mampu menjelaskan politik luar negeri (Jackson & Sorensen, 2016). Liberalis institusionalis memperlihatkan bahwasanya perlu memberikan peraturan lembaga dalam memulai dan memperkuat hubungan diplomatis terhadap negara. Hal ini juga mengacu pada kebangkitan kapasitas suatu negara dan potensi yang ada pada lembaga internasional. Pandangan liberalisme juga memperlihatkan organisasi internasional sebagai wadah yang memberikan manfaat kepada negara lain sebagai cara untuk mempermudah kerja sama dengan aktor-aktor lain. Keuntungan relatif menjadi tujuan maupun poin utama dalam pembentukan organisasi/lembaga internasional yang secara khusus akan berorientasi pada bidang perekonomian dan perpolitikan suatu negara.

Fokus liberal institusionalisme yang mengedepankan kepada peran institusi di tengah sebuah hubungan kerja sama antar negara pada bidang perekonomian dan

perpolitikan negara ini selaras dengan kerja sama antara Indonesia dan Jepang dalam *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement*. Karenanya, peneliti menggunakan teori ini sebagai fondasi penulisan. Ada pun kegunaan dari teori ini adalah untuk menganalisis kerja sama antara Indonesia dan Jepang.

### **2.2.2 Kerja Sama Internasional**

Kerja sama internasional menurut Ira William Zartman dan Saadia Touval didefinisikan sebagai sebuah situasi di mana beberapa pihak saling bersepakat untuk bekerja dan menghasilkan sebuah keuntungan baru yang sebelumnya tidak dapat dimiliki oleh masing-masing pihak tanpa adanya kontribusi dari pihak lain, dalam konteks ini adalah negara lain (Zartman & Touval, 2010). Ketidak mampuan negara dalam memenuhi kebutuhannya secara mandiri menghadirkan pola yang mana negara menjadi saling berkegantungan dengan satu sama lain. Baik secara aktif atau pasif, negara membutuhkan bantuan untuk mencapai tujuannya. Hal ini juga sejalan dengan pandangan Zartman dan Touval yang mengatakan bahwa kerja sama internasional mempermudah negara-negara dalam mencapai tujuannya dibanding bertindak seorang diri (Zartman & Touval, 2010). Pun, sesuai dengan definisi menurut Robert Keohane, bahwasanya kerja sama internasional merupakan suatu proses kebijakan antar pemerintah yang bertujuan untuk saling memfasilitasi dalam merealisasi tujuan atau kepentingan negara-negara terkait (Keohane R. O., 1984).

Dalam pembentukan sebuah kerja sama internasional, terdapat beberapa elemen yang melengkapinya, yakni, kesepakatan dari masing-masing pihak, bersifat transaksional atau ada timbal balik dan keuntungan yang didapatkan oleh tiap pihak yang tergabung. Ada pun yang dimaksud dengan keuntungan tidak hanya terbatas dengan hal-hal yang bersifat materiil, namun bisa diartikan sebagai banyak hal yang sesuai dengan kebutuhan atau kepentingan dari pihak-pihak terkait seperti peningkatan

keamanan, peningkatan ekonomi, *exposure* budaya, dll. Tidak hanya memiliki banyak tujuan, kerja sama internasional juga meliputi banyak bidang seperti politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta ekonomi. IJEPA yang tengah penulis teliti sendiri termasuk ke dalam kerja sama internasional pada bidang ekonomi dalam bentuk *Economic Partnership Agreement* (EPA)<sup>5</sup>.

Terlepas dari luasnya cakupan sebuah kerja sama internasional dan banyaknya keuntungan yang bisa didapatkan, terdapat pula beberapa cara yang menurut Wayne Sandholtz dapat dilakukan oleh seorang pemimpin agar dapat menciptakan sebuah kerja sama internasional yang efektif, yaitu (Sandholtz, 1992):

1. *Persuading*

Melakukan persuasi kepada *potential partner* bahwa kerja sama akan saling menguntungkan kedua pihak;

2. *Setting agendas*

Menyajikan kerangka awal dari kerja sama (*potential goals* dan *modalities of cooperation*) yang akan ditawarkan untuk bernegosiasi;

3. *Mobilizing coalitions*

Menarik *potential partner* untuk berdiskusi mengenai kerja sama yang ditawarkan;

4. *Promoting consensus*

Mendorong pemahaman teknis secara umum dari permasalahan dan dampak dari hubungan yang akan dilakukan di waktu mendatang;

5. *Pushing compromises*

Menetapkan *potential agreement* di antara kepentingan satu sama lain yang berbeda.

---

<sup>5</sup> EPA merupakan kerja sama yang dilakukan oleh dua negara atau lebih yang ditujukan untuk menghapus atau mengurangi tarif pada barang serta hambatan perdagangan jasa antar suatu negara. Dengan adanya EPA, pajak yang sebelumnya dilimpahkan terhadap suatu barang pun bisa dikurangi. EPA sendiri dapat menjadi pendorong bagi negara yang terlibat untuk memperdalam kerja sama yang berlangsung (JETRO Indonesia, t.thn.).

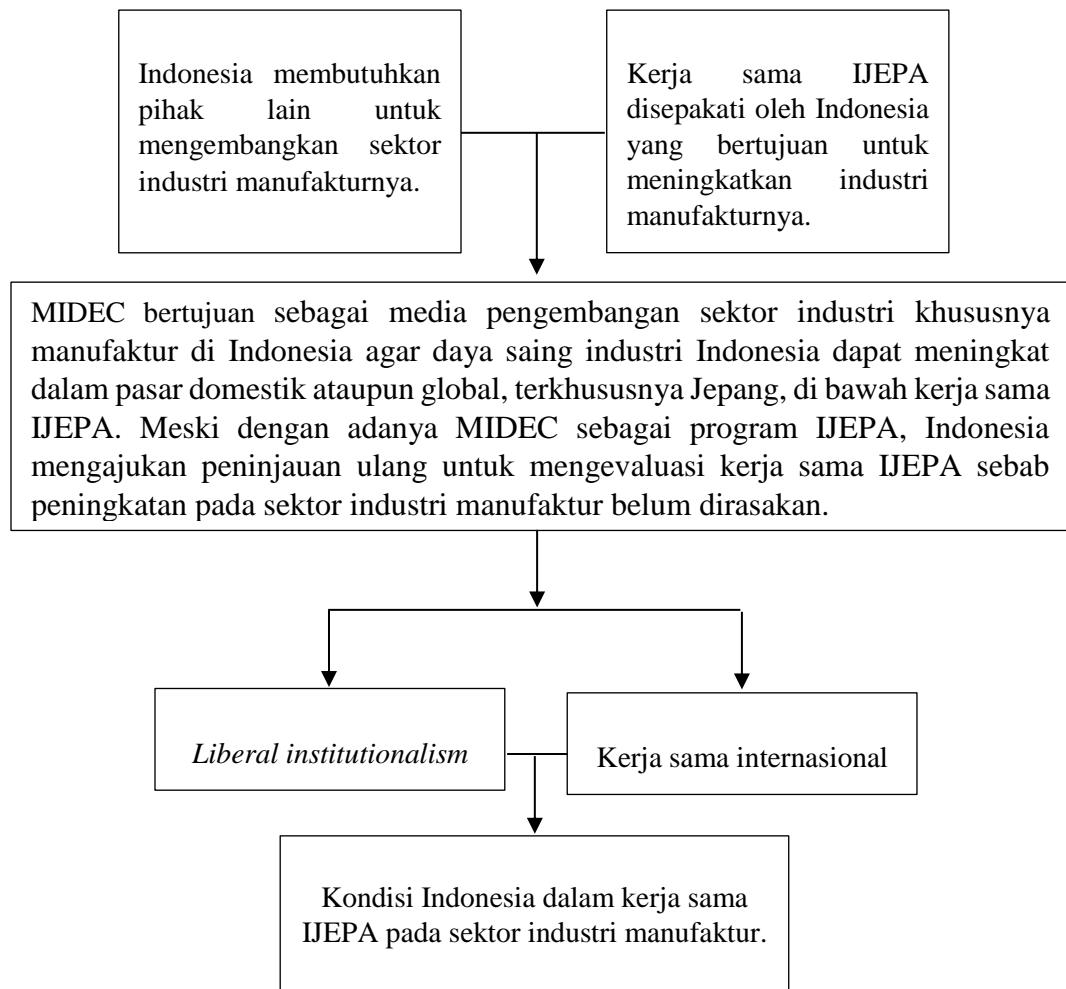


Selain dari yang telah disebutkan di atas, kerja sama internasional memiliki tiga bentuk, yaitu: regional, multilateral dan bilateral. Sebab IJEPA merupakan sebuah bentuk dari kerja sama bilateral, maka penulis akan mengerucutkan penjabaran kepada kerja sama bilateral. Kerja sama bilateral termasuk kedalam kerja sama internasional yang dilaksanakan hanya oleh dua negara, definisi lebih lanjut tidak berbeda dengan kerja sama internasional yang adalah sebuah kondisi di mana negara saling bersepakat untuk saling memberi keuntungan baru kepada negara *partner*. Kerja sama bilateral juga banyak dipilih negara-negara untuk menjalin hubungan dengan negara lain sebab sedikitnya aktor (hanya dua negara) yang terlibat dalam kerja sama tersebut sehingga banyak kerja sama dapat di bangun dengan cepat yang mana kerja sama bilateral juga mendorong terjadinya *interconnectedness* antar dua negara yang menjalaninya (Heywood, 2014). Konsep kerja sama internasional ini akan penulis gunakan untuk mendeskripsi dan menganalisis kondisi dari kerja sama antara Indonesia dan Jepang melalui IJEPA pada sektor industri di Indonesia tahun 2015-2019 melalui agenda-agenda serta skema-skema yang telah IJEPA tetapkan dan lakukan untuk Indonesia.

### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Pada saat awal disepakatinya IJEPA oleh Presiden SBY dan PM Shinzo Abe di tahun 2007, yang mana IJEPA merupakan kerjasama ekonomi terintegrasi yang salah satu fokus utamanya ialah sektor perindustrian. Sektor industri, khususnya manufaktur, adalah hal yang dianggap penting bagi Indonesia sebab sektor ini adalah salah satu sektor utama pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Melalui IJEPA, terdapat program MIDEK yang dibentuk untuk mendukung Indonesia mengembangkan kapabilitas industri serta daya saing industrinya. Namun, pada tahun 2013 Indonesia mengajukan peninjauan ulang untuk mengevaluasi isi dari perjanjian IJEPA yang sebelumnya telah disepakati bersama. Hal itu dilakukan sebab Indonesia belum

merasakan adanya manfaat yang sesuai dengan yang diharapkan dari kerja sama dengan Jepang ini. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka kerangka berpikir yang penulis buat ialah sebagai mana berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penulis**

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Menurut Alan Bryman, penelitian kualitatif adalah penelitian yang biasanya menekankan kepada kata dan kalimat dibandingkan kuantifikasi dalam pengumpulan dan analisis data (Bryman, 2012). Metode kualitatif merupakan metode yang mengeksplorasi terkait permasalahan sosial dari individual ataupun kelompok (Creswell, 2014). Fenomena sosial sendiri terjadi akibat adanya interaksi antara individu juga kelompok, hal itu lah yang dikemukakan oleh penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif juga merupakan penelitian yang bersifat eksplanatori yang ditujukan untuk memberi penjelasan terkait suatu permasalahan atau kasus yang lalu dielaborasi menggunakan teori serta konsep dan menghasilkan penjelasan yang sistematis. Berdasarkan pengertian yang telah disebutkan, penulis menginterpretasikannya ke dalam topik penelitian ini mengenai kondisi Indonesia pada kerja sama IJEPA dalam sektor industri manufaktur di Indonesia.

#### **3.2 Fokus Penelitian**

Untuk membatasi penelitian agar tidak melebar dan tidak terjebak dengan seluruh data yang penulis dapatkan, penulis pun menetapkan fokus penelitian untuk membantu penulis menyaring data yang penulis gunakan dalam menyusun

penelitian ini. Penelitian milik penulis ini berfokus kepada kondisi Indonesia pada kerja sama antara Indonesia dan Jepang melalui IJEPA pada sektor perindustrian manufaktur pada kurun waktu 2015 hingga 2019 yang didasari oleh teori *liberal institutionalism* dan konsep kerja sama internasional. Penelitian ini memaparkan kondisi Indonesia pada kerja sama IJEPA dalam sektor industri manufaktur.

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder. Data sekunder sendiri didefinisikan sebagai data yang telah lebih dulu dikumpulkan oleh pihak lain dan dapat digunakan oleh peneliti lain untuk mendukung penelitiannya (Boslaugh, 2007). Boslaugh juga turut menyebutkan bahwa penggunaan data sekunder dalam sebuah penelitian memiliki keuntungan tersendiri. Keuntungan tersebut berupa penghematan waktu yang digunakan saat melakukan penelitian sebab data yang akan digunakan sudah tersedia, juga dalam segi ekonomi, peneliti tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk mendapatkan data yang diinginkan sebab banyak data sekunder yang dapat diakses bebas dan gratis walau beberapa ada pula yang berbayar.

Dalam tugas akhir yang disusun oleh penulis ini, data sekunder yang digunakan, didapat melalui studi pustaka dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, skripsi, dan data tertulis lain yang penulis akses dari *google scholar*, *website* resmi pemerintah Indonesia (Kementerian Keuangan, Kementerian Dagang, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Perindustrian) juga *website* resmi pemerintah Jepang (Kementerian Luar Negeri) dan *website* jurnal universitas serta lembaga penelitian lain.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang bisa dilakukan seperti observasi, wawancara, studi pustaka dan studi dokumentasi baik berupa teks, video maupun audio (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Dari beberapa teknik yang telah disebutkan, penulis menggunakan teknik studi pustaka dan dokumentasi dengan melakukan penelusuran dokumen berupa buku, jurnal, laporan resmi yang dikeluarkan oleh Indonesia maupun Jepang serta berita dari berbagai portal daring juga studi pustaka untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kerja sama Indonesia dan Jepang di bawah kerangka IJEPA pada tahun 2015-2019.

### 3.5 Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis topik dari penelitian ini, penulis memproses data yang didapatkan secara induktif, yaitu melakukan penjabaran dari topik yang bersifat spesifik ke topik yang bersifat *general* (Thomas, 2006). Dengan teknik analisis ini, penulis menganalisa dan menjabarkan permasalahan dengan data yang diperoleh dan mengaitkannya dengan teknik dan konsep. Ada pun beberapa tahapan dari teknik analisis data kualitatif (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014) adalah:

1. Kondensasi Data

Kondensasi data mengacu kepada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan atau abstraksi dari data yang telah didapatkan. Tahap kondensasi ini dilakukan untuk mempertegas data yang digunakan dalam sebuah penelitian. Adanya penyederhanaan data akan membantu penulis dalam menarik gambaran yang akan mempermudah dalam melakukan pengumpulan data lainnya.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data adalah bentuk pengelompokan data secara terorganisir dalam bentuk narasi sehingga data dapat dipahami lebih mudah oleh pembaca. Penyajian data ini nantinya membantu peneliti semakin memahami permasalahan yang terjadi dan dapat menyusun rencana pengerjaan selanjutnya berdasarkan pemahaman yang telah didapati. Untuk melakukan analisis, peneliti dapat menyajikan data dalam bentuk tabel, grafik, gambar maupun narasi lalu menyatukan data yang didapat dengan konsep yang dipilih.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Hasil akhir dari penelitian disimpulkan dalam bentuk narasi dan deskriptif berdasarkan data-data yang sebelumnya telah disusun. Hasil yang didapatkan bisa bersifat deskriptif ataupun dengan bentuk gambar suatu obyek yang telah diteliti.

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Pada bagian kesimpulan ini, berisi tentang hasil penelitian yang dilakukan pada bab sebelumnya dengan menunjukkan adanya kondisi yang Indonesia hadapi dalam melaksanakan kerja sama bersama Jepang dalam IJEPA. Penelitian ini dielaborasi menggunakan teori utama yaitu liberal institusionalisme yang akan menjelaskan bagaimana IJEPA sendiri sebagai wadah kerja sama yang di institusikan agar mendapatkan perannya yang begitu besar di dalam hubungan Indonesia dan Jepang. IJEPA memiliki berbagai upaya yang dilakukan dalam mencapai kepentingan Indonesia dalam kerja sama dengan Jepang seperti memfasilitasi perdagangan dengan tujuan untuk mempercepat aktivitas perdagangan yang telah dilakukan oleh kedua negara; investasi pada sektor industri juga menjadi bagian dari efisiensi terhadap inovasi manufaktur kedua negara yang berorientasi pada kerja sama teknologi, *capacity building* dan transfer pengetahuan. Pengembangan sumber daya manusia juga tidak luput sebagai cara IJEPA dalam memberikan pelatihan dan pertukaran pengetahuan dengan tujuan dalam menghadapi tantangan global yang dihadapi langsung oleh kedua negara. Namun, berbagai upaya yang telah dilakukan belum cukup bagi Indonesia untuk meningkatkan sektor industri manufakturnya yang dikarenakan sikap Indonesia yang cenderung terburu-buru dalam mendapatkan tujuannya. Selain karena sikap Indonesia yang terburu-buru akibat kekhawatiran yang dirasakan, terdapat pula kesenjangan dalam bidang teknologi, GDP, juga SDM antara kedua negara yang membuat Indonesia semakin tergesa-gesa.

## 5.2 Saran

Kerja sama terjalin antar dua negara atau lebih untuk mencapai suatu kesepahaman dan keuntungan bersama. Namun, terkadang permasalahan hadir dan menghambat kerja sama yang sebelumnya telah disepakati. Seperti halnya kerja sama antara Indonesia dan Jepang yang menghadapi hambatan dalam pelaksanaan IJEPA. Untuk menghindari permasalahan yang sama di masa yang akan datang, peneliti ingin memberi saran kepada pemerintah agar:

1. Bisa memahami terlebih dahulu kondisi negara sebelum menyepakati suatu kerja sama internasional agar nantinya dapat menghindari permasalahan serupa seperti yang terjadi pada IJEPA, yang mana Indonesia tidak bisa secara instan merasakan manfaat dari kerja sama yang telah disepakati.
2. Membentuk program yang terstruktur secara administratif agar program yang telah dibuat dapat diperhatikan dengan seksama perkembangannya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Avivi, Y., & Siagian, M. (2020). Kepentingan Indonesia Dalam Kerja Sama Bilateral Dengan Jepang Studi Kasus: Indonesia-Japan Partnership Agreement (IJEPA). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 1*, 56.
- Badan Pusat Statistik. (t.thn.). *Istilah*. Diambil kembali dari Badan Pusat Statistik: [https://www.bps.go.id/istilah/index.html?Istilah\\_page=8](https://www.bps.go.id/istilah/index.html?Istilah_page=8)
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Meranti. (t.thn.). *Istilah*. Diambil kembali dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Meranti: [https://merantikab.bps.go.id/istilah/index.html?Istilah\\_sort=deskripsi\\_ind &Istilah\\_page=51](https://merantikab.bps.go.id/istilah/index.html?Istilah_sort=deskripsi_ind&Istilah_page=51)
- Boslaugh, S. (2007). *Secondary Data Sources for Public Health: A Practical Guide*. New York: Cambridge University Press.
- Bryman, A. (2012). *Social Research Methods 4th Edition*. New York: Oxford University Press Inc.
- Cambridge Dictionary. (t.thn.). *Industry*. Diambil kembali dari Cambridge Dictionary: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/industry>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Designs: Qualitative, Quantitative, and Mixed*. California: Sage Publications Inc.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2022, Juli 13). *Ketentuan Skema Free Trade Agreements (FTA)*. Diambil kembali dari Kementerian Keuangan: <https://www.beacukai.go.id/faq/ketentuan-skema-free-trade-agreements-fts->



Japan Customs. (t.thn.). *Guide to obtaining preferential tariff treatment when importing goods under the RCEP Agreement*. Diambil kembali dari Japan Customs: <https://www.customs.go.jp/english/epa/rcep/rcep.html>

JETRO. (2010). *Handbook for Consumer Products Import Regulations*.

JETRO Indonesia. (t.thn.). *EPA/FTA*. Diambil kembali dari JETRO Indonesia: <https://www.jetro.go.jp/indonesia/EPAFTA.html>

Kambey, E. S. (2016). Kegagalan Indonesia Dalam Implementasi Indonesian Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA). *Jurnal Lyceum Vol. 4 No. 1*, 50.

Kambey, E. S. (2016). Kegagalan Indonesia Dalam Implementasi Indonesian Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA). *Journal Lyceum: Vol. 4 No. 1*.

KBBI. (t.thn.). Diambil kembali dari KBBI: <https://kbbi.web.id/manufaktur>

KBRI Tokyo. (t.thn.). *Tentang Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)*. Diambil kembali dari Japan-Indonesia Partnership Lounge: <https://www.dashboard.kbritokyo.jp/tentang-ijepe#:~:text=Kesepakatan%20IJEPA%20mencakup%3A,antara%20Pemerintah%20Jepang%20dan%20Indonesia>

Kementerian Keuangan. (2008, Juni 30). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.011/2008. *Penetapan Tarif Bea Masuk Dengan Skema User Specific Duty Free Scheme (USDFS) Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Jepang Mengenani Suatu Kemitraan Keuangan*. Jakarta.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2017, Maret 10). *Indonesia Minta Jepang Klarifikasi Hambatan Perdagangan*. Diambil kembali dari Permanent Mission of the Republic of Indonesia To the United Nations, World Trade Organization and Other International Organization: <https://mission-indonesia.org/2017/03/10/indonesia-minta-jepang-klarifikasi-hambatan-perdagangan/>

Kementerian Perdagangan RI. (2019, Maret 27). *11th Joint Committee Meeting of General Review of Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement*

(*GR-IJEPA*). Retrieved from Kemendag RI: <https://www.kemendag.go.id/berita/foto/11th-joint-committee-meeting-of-general-review-of-indonesia-japan-economic-partnership-agreement>

Kementerian Perdagangan RI. (2019, Mei 22). *Pertemuan ke-12 Komite Bersama (JCM-12) General Review Indonesia-Japan EPA (GR IJEPA)*. Retrieved from Kemendag: <https://www.kemendag.go.id/berita/foto/pertemuan-ke-12-komite-bersama-jcm-12-general-review-indonesia-japan-epa-gr-ijepa>

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. (2014). *Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019*.

Kementerian Perindustrian Indonesia. (2008). *Kedalaman Struktur Industri yang Mempunyai Daya*. Jakarta: Kementerian Perindustrian Indonesia.

Kementerian Perindustrian Indonesia. (2013, Juni 18). *RI-Jepang Tingkatkan Daya Saing Industri Melalui Kerjasama MIDEK*. Diambil kembali dari Kementerian Perindustrian Indonesia: <https://www.kemenperin.go.id/artikel/6538/RI-Jepang-Tingkatakan-Daya-Saing-Industri-Melalui-Kerjasama-MIDEK>

Kementerian Perindustrian Indonesia. (2013, Desember 27). *Seluruh Sektor Dirugikan Dalam IJEPA*. Diambil kembali dari Kementerian Perindustrian Indonesia: <https://kemenperin.go.id/artikel/8276/Seluruh-Sektor-Dirugikan-dalam-IJEPA>

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2013, Maret 13). *Mengecewakan, Kemitraan RI-Jepang Ditinjau Ulang*. Diambil kembali dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia: <https://kemenperin.go.id/artikel/5803/Mengecewakan,-Kemitraan-RI-Jepang-Ditinjau-Ulang>

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2016, Maret 4). *Produsen Jepang Ancam Hentikan Produksi*. Diambil kembali dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia: <https://kemenperin.go.id/artikel/14622/Produsen-Jepang-Ancam-Hentikan-Produksi>

- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2018). *Making Indonesia 4.0*. Retrieved from Kementerian Perindustrian Republik Indonesia: <https://kemenperin.go.id/download/21267>
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2019). *Transformasi Manufaktur Menuju Industri Maju: Laporan Kinerja Kementerian Perindustrian 2015-2019*. Jakarta.
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2021, Agustus 17). *Refleksi HUT Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-76*. Diambil kembali dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia: <https://kemenperin.go.id/artikel/22724/Refleksi-HUT-Kemerdekaan-Republik-Indonesia-Ke-76>
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (t.thn.). *Sejarah Kementerian Perindustrian*. Diambil kembali dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia: <https://www.kemenperin.go.id/profil/69/sejarah-kementerian-perindustrian>
- Kementerian Perindustrian RI. (2019, Juni 28). *Kemenperin*. Retrieved from Twitter: [https://twitter.com/Kemenperin\\_RI/status/1144427179574362112](https://twitter.com/Kemenperin_RI/status/1144427179574362112)
- Kementerian Perindustrian RI. (2019, Juni 28). *Kemenperin*. Retrieved from Twitter: [https://twitter.com/Kemenperin\\_RI/status/1144425453425266695](https://twitter.com/Kemenperin_RI/status/1144425453425266695)
- Kementrian Perindustrian Republik Indonesia. (2015, February 9). *Evaluasi Efektivitas USDFS untuk Baja*. Retrieved from Kementrian Perindustrian Republik Indonesia: <https://kemenperin.go.id/artikel/11073/Evaluasi-Efektivitas-USDFS-untuk-Baja>
- Keohane, R. O. (1984). *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*. New Jersey: Princeton University Press.
- Keohane, R., & Nye, J. (2012). *Power and Interdependence*. Oxford University.
- Menlu RI. (2018, Juni 28). *Menteri Luar Negeri Republik Indonesia*. Retrieved from Twitter: [https://twitter.com/Menlu\\_RI/status/1144490477921529857](https://twitter.com/Menlu_RI/status/1144490477921529857)

- Menlu RI. (2018, November 15). *Menteri Luar Negeri Republik Indonesia*. Retrieved from Twitter: [https://twitter.com/Menlu\\_RI/status/1063042718090199041](https://twitter.com/Menlu_RI/status/1063042718090199041)
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook 3rd Edition*. Arizona State University: SAGE Publications, Inc.
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2003, Juni 24). *Joint Announcement By The Prime Minister of Japan and the President of the Republic of Indonesia on the Possibility of the Economic Partnership Agreement Between Japan and Indonesia*. Diambil kembali dari Ministry of Foreign Affairs of Japan: <https://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/indonesia/pv0306/economy.pdf>
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2005, May). *Japan-Indonesia Economic Partnership Agreement: Joint Study Group Report*. Retrieved from Ministry of Foreign Affairs of Japan: <https://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/indonesia/summit0506/joint-3-2.pdf>
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2005, Juni 2). *Joint Announcement of the Commencement of Negotiations on the Japan Economic Partnership Agreement*. Diambil kembali dari Ministry of Foreign Affairs of Japan: <https://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/indonesia/summit0506/joint-3.html>
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2006, November 28). *Joint Press Statement Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement*. Diambil kembali dari Ministry of Foreign Affairs of Japan: <https://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/indonesia/joint0611-2.html>
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2006, Oktober 6). *The Sixth Round of Negotiations on Japan-Indonesia Economic Partnership Agreement*. Diambil kembali dari Ministry of Foreign Affairs of Japan: <https://www.mofa.go.jp/announce/event/2006/10/1006-2.html>
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2007, Agustus 20). *Agreement Between Japan and The Republic of Indonesia For an Economic Partnership*.

Diambil kembali dari Ministry of Foreign Affairs of Japan:  
<https://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/indonesia/epa0708/agreement.pdf>

Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2007, Agustus 20). *Joint Statement at the Signing of the Agreement Between Japan and the Republic of Indonesia for an Economic Partnership*. Diambil kembali dari Ministry of Foreign Affairs of Japan: <https://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/indonesia/epa0708/joint.html>

Muamar, Y. (2020, Februari 6). *Sektor Manufaktur RI 2019 Lesu, 11 Saham Otomotif Ini Merana*. Retrieved from CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200206164015-17-135908/sektor-manufaktur-ri-2019-lesu-11-saham-otomotif-ini-merana>

Mursitama, T. N., Noerlina, & Sabrina, A. (2019). Implementation Of Indonesia Japan Economic Partnership Agreement: A Comparison Of User Specific Duty Free Scheme And Manufacturing Industrial Development Center Programs. *International Journal Of Scientific & Technology Research Volume 8, Issue 07*, 121.

NASA. (1996, Juni 4). *Manufacturing Industry*. Diambil kembali dari NASA: <https://www.hq.nasa.gov/iwgdsdi/Manufacturing.html>

Sandholtz, W. (1992). *High-Tech Europe: The Politics of International Cooperation*. California: University of California Press, Ltd.

Sitepu, J., & Kurnia, A. S. (2019). Dampak Penerapan Indonesia - Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) Terhadap Nilai Ekspor Impor Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan Vol. 2 No. 3*, 19.

The World Intellectual Property Organization. (2022). *Global Innovation Index*. Diambil kembali dari WIPO: <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-2000-2022-en-main-report-global-innovation-index-2022-15th-edition.pdf>

Thomas, D. R. (2006). A General Inductive Approach for Analyzing Qualitative Evaluation Data. *American Journal of Evaluation Vol. 27 No. 2*, 238.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian.  
(t.thn.). Diambil kembali dari  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46975/uu-no-5-tahun-1984>

United Nations. (2014). *World Situation and Prospects 2014*. United Nations.

US International Trade Administration. (t.thn.). *Harmonized System (HS) Codes*.  
Diambil kembali dari US International Trade Administration:  
<https://www.trade.gov/harmonized-system-hs-codes>

Wibowo, T. (2010). *Potret Industri Manufaktur Indonesia Sebelum dan Pasca Krisis*. Diambil kembali dari Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia:  
<https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2010/05/12/092358863386920-potret-industri-manufaktur-indonesia-sebelum-dan-pasca-krisis>

World Economic Forum. (2019, May 16). *What the Fifth Industrial Revolution is and why it matters*. Retrieved from The European Sting:  
<https://europeansting.com/2019/05/16/what-the-fifth-industrial-revolution-is-and-why-it-matters/>

Zartman, I. W., & Touval, S. (2010). *International Cooperation: The Extents and Limits of Multilateralism*. New York: Cambridge University Press.

Zulfira, R. D. (2019). Dampak Hubungan Bilateral Indonesia dengan Jepang Sebelum dan Sesudah Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* 2 (1), 35.